

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat karena pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam suatu negara. Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah suatu proses perbaikan yang berkesinambungan dari suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik. Proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat serta harkat dan martabat manusia yang meliputi peningkatan berbagai barang kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup serta perluasan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah wajib berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian secara umum, pemerintah berperan dalam mengendalikan dan mengatur perekonomian. Namun, dalam hal ini tugas mempertinggi tingkat kesejahteraan bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga seluruh komponen masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus mendorong dan memberdayakan seluruh komponen masyarakat termasuk sektor swasta untuk berperan lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perekonomian yang lebih tinggi, adil dan merata dapat dicapai dengan lebih baik dan cepat.

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam konsep nilai tambah yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB). PDB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara atau sebagai cerminan keberhasilan suatu pemerintahan dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi (Buana, 2018). PDB disajikan dalam dua konsep harga, yaitu harga berlaku dan harga

konstan. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari PDB atas harga konstan. PDB atas dasar harga konstan, sering disebut dengan PDB riil, yang merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDB atas dasar harga konstan memperlihatkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai refleksi capaian yang diperoleh dalam pembangunan dalam jangka waktu tertentu.

Peranan pemerintah dalam hal pembangunan perekonomian juga dapat dikaji dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Nasional (APBN) di tingkat pemerintah pusat dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat pemerintah daerah. Struktur APBN dan APBD terbagi atas sisi penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen penting bagi pembangunan ekonomi. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi (Nordhaus, 2013). Pengeluaran pemerintah dalam hal ini berperan besar dalam mempercepat perekonomian dimana perekonomian ini nantinya apabila berjalan dengan baik tentunya akan semakin banyak membuka peluang kerja atau peluang usaha di dalam perekonomian.

Pemerintah pusat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Salah satu laporan yang dihasilkan yaitu Laporan Realisasi APBN. Laporan ini menggambarkan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama 1 periode anggaran. Belanja atau pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2014 realisasi belanja negara adalah sebesar Rp1.777,18 triliun sedangkan pada tahun 2015 jumlahnya bertambah menjadi Rp1.806,51 triliun. Tahun 2016 sebesar Rp1.864,27 triliun dan pada tahun 2017 merupakan pengeluaran tertinggi dari periode sebelumnya yaitu sebesar Rp2.007,35 triliun.

Selain pengeluaran pemerintah, instrumen penting lain untuk menggerakkan perekonomian adalah investasi. Menurut Hartono (2012), investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu yang tertentu. Dengan adanya aktiva yang produktif, penundaan konsumsi sekarang untuk diinvestasikan ke aktiva yang produktif tersebut akan meningkatkan utiliti total. Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Banyak faktor yang menyebabkan Indonesia selalu menarik minat investor asing untuk berinvestasi. Selain jumlah penduduk yang tinggi, kekayaan sumber daya alam seperti tambang, hutan, dan laut menjadi incaran investor. Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 250.000.000 jiwa merupakan pasar yang besar bagi investor.

Dijelaskan di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 06 Tahun 2016, investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pengendalian atas suatu badan usaha dalam rangka melaksanakan kebijakan fiskal/publik, untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang dipersamakan. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, instrumen ekuitas dan penyertaan saham/ kepemilikan.

Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah disajikan pada Laporan Realisasi APBN yang terdapat di pos pembiayaan. Diketahui, investasi pemerintah tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp8,9 triliun. Tahun anggaran 2015 investasi pemerintah meningkat pesat menjadi sebesar Rp59,65 triliun dan pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp84,07 triliun. Tahun anggaran 2017 menurun menjadi sebesar Rp49,25 triliun.

Indonesia perlu mewaspadai sejumlah faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi salah satunya yaitu masih minimnya investasi swasta. Indonesia juga membutuhkan peran investasi swasta yang kuat dan reformasi kebijakan yang komprehensif untuk pertumbuhan yang lebih baik. Investasi Swasta diperlukan karena dalam melakukan pembangunan ekonomi dibutuhkan biaya yang cukup besar yang salah satunya diperoleh dari investasi swasta baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMA sebagai salah satu jenis penanaman modal yang memiliki peran sangat besar dalam pembangunan. Modal ini masuk dalam bentuk investasi langsung yang dapat berupa pendirian pabrik guna menyerap tenaga kerja maupun investasi tidak langsung yang dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi.

Bentuk investasi swasta berikutnya adalah penanaman modal dalam negeri (PMDN). Rostow dalam Todaro (2010) mengemukakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi suatu negara harus bertumpu pada kemampuan dalam negeri, sementara sumber daya luar seharusnya hanya bersifat merangsang dan membantu kekuatan dalam negeri. PMDN sebagai sumber domestik merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Di satu pihak mencerminkan permintaan efektif dan dilain pihak menciptakan efisiensi produktif bagi produksi dimasa depan. Proses penanaman modal ini menghasilkan kenaikan output nasional dalam berbagai cara. Penanaman modal dalam negeri ini pula yang akan membawa kearah kemajuan teknologi. Jadi PMDN menghasilkan kenaikan besarnya output nasional, pendapatan, dan pekerjaan, dengan demikian memecahkan masalah inflasi dan neraca pembayaran. Penanaman modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk yang meningkat di negara tersebut.

Menurut Handayani (2011), hubungan antara investasi yaitu PMA dan PMDN dengan pertumbuhan ekonomi adalah dengan adanya investasi berupa pembelian barang modal dan pelengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian sehingga hal ini dapat meningkatkan PDB riil Indonesia. Dengan demikian akan

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Sutawijaya (2010) mengatakan bahwa peningkatan investasi akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru, yang pada tahap selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2014 realisasi investasi asing sebesar Rp354,91 triliun dan naik menjadi Rp403,86 triliun pada tahun 2015. Sedangkan, PMDN tahun 2014 sebesar Rp156,13 triliun dan pada tahun 2015 naik menjadi Rp179,47 triliun. Pada tahun 2016 realisasi investasi baik PMDN maupun PMA adalah sebesar Rp612,8 triliun atau melampaui target investasi 2016 sebesar 3% dari angka target sebesar Rp594 triliun. Tren positif kembali terjadi pada 2017, realisasi investasi baik PMDN maupun PMA merupakan realisasi investasi tertinggi sejak tahun 2014 yaitu mencapai angka Rp692,8 triliun, melampaui target realisasi investasi PMDN dan PMA 2017 sebesar Rp678,8 triliun.

Kenaikan realisasi investasi pada tahun 2015 ternyata tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,02% dan pada tahun 2015 mengalami perlambatan menjadi sebesar 4,79%. Perlambatan angka pertumbuhan pada tahun 2015 tersebut menurut Suryamin (2015) disebabkan karena adanya perlambatan dari sisi produksi maupun sisi konsumsi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi disebabkan oleh terlambatnya realisasi belanja infrastruktur. Sedangkan dari sisi pengeluaran, terdapat beberapa penyebab, salah satunya yaitu komponen pengeluaran yang rendah dan pengeluaran konsumsi yang melambat.

Selain mampu memacu pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi sulit, pemerintah juga berhasil meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi nasional tahun selanjutnya. Pada tahun 2016, perekonomian Indonesia tumbuh kembali ke level 5,02% dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017 merupakan yang tertinggi sejak tahun 2014 mampu tumbuh sebesar 5,07%.

Penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi sudah dilakukan oleh banyak peneliti. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2018) memperoleh hasil bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut Bawinti (2018), pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi swasta secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi namun pengeluaran pemerintah dan investasi swasta secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut dilaksanakan pada satu kota tertentu saja, pada penelitian ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian pada tiap Provinsi di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
2. Apakah investasi pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
3. Apakah investasi swasta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
4. Apakah pengeluaran pemerintah, investasi pemerintah dan investasi swasta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, perlu dibatasi ruang lingkup pembahasannya sehingga penulisan skripsi ini dapat dilakukan secara lebih terarah dan dapat mencapai tujuan serta sesuai dengan permasalahan yang ada. Dari data yang diperoleh, maka pembahasan dibatasi pada analisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan

investasi pemerintah pada laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tahun 2014-2017 serta analisis pengaruh investasi swasta pada data yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS).

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah investasi pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah investasi swasta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah pengeluaran pemerintah, investasi pemerintah dan investasi swasta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga sebagai masukan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kedepannya.

2. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis berkaitan dengan penelitian.

3. Bagi Akademisi

Memperkaya penelitian-penelitian sejenis yang telah ada yang dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian-penelitian berikutnya.